Impak Sosialisasi Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wp, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Mengenai Ketaatan Wp Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Samsat Kabupaten Sleman 2024)

Sekar Karima[1], Ardan Gani Asalam[2]
[1] Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, sekarkarima@student.telkomuniversity.ac.id
[2] Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, ganigani@telkomuniversity.ac.id

Abstrak
Pengkajian diarahkan untuk mengkaji sejauh mana efek dari sosialisasi pkb, kesadaran wp, mutu layanan, dan pemberlakuan sanksi mengenai tingkat ketaatan wp kendaraan bermotor di lingkungan SAMSAT Kab. Sleman pada tahun 2024. Ketaatan mengenai kewajiban pkb dipandang serupa elemen fundamental dalam menjaga kesinambungan pendapatan asli daerah (PAD) serta serupa asal usul pembiayaan kemajuan yang berkelanjutan. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui teknik survei, melalui teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuisioner kepada responden yang merupakan wajib pkb di kawasan tersebut. Teknik penjabaran yang digunakan meliputi statistik deskritif serta regresi linier berganda untuk mengetahui koneksi serta dampak aspek bebas mengenai aspek terikat berupa tingkat ketaatan pajak. Berdasarkan hasil penjabaran, ditemukan bahwa aspek sosialisasi, kesdaran pajak, dan kualitas layanan menyiratkan impak yang positif serta sig. mengenai tingkat ketaatan wp. Temuan ini menyiratkan bahwa peningkatan intensitas edukasi serta penyediaan pelayanan yang berkualitas berperan krbayal dalam mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan pajak. Namun, aspek sanksi pajak tidak memperlihatkan impak yang berarti secara statistik, yang menandakan bahwa perlu dilakukan peninjauan ulang mengenai efektivitas mekanisme sanksi serupa alat pemaksaan hukum pajak. Implikasi dari hasil ini mendorong pihak SAMSAT Kabupaten Sleman untuk mengutamakan strategi peningkatan kegiatan sosialisasi dan perbaikan mutu layanan serupa sarana peningkatan ketaatan pajak yang lebih maksimal.

***Kata Kunci**:* Kepatuhan Wajib Pajak; Kesadaran Wajib Pajak; Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor; Sanksi Perpajakan; Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor**.**

I. PENDAHULUAN

Pajak daerah, termasuk PKB (PKB), merupakna komponen krbayal dalam meluaskan PAD di berbagai wilayah Indonesia (UU No. 1 Tahun 2022). Di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan, yaitu dari 56.850 unit pada tahun 2019 menjadi sekitar 1.265.823 unit pada tahun 2023 (BPS DIY, 2024), yang menjadikan sektor ini serupa potensi utama penerimaan pajak. Namun demikian, tingkat ketaatan mengenai kewajiban pajak kendaraan masih menjadi tantangan. Meskipun tren ketidakpatuhan mengalami penurunan dari 12,32% pada 2021 menjadi 4,65% di tahun 2024 (samsatsleman.jogjaprov.go.id, 2024), isu ini belum sepenuhnya terselesaikan. Penerapan kebijakan opsen PKB yang mulai diberlakukan pada tahun 2025 diperkirakan dapat memberikan kontribusi tambahan mengenai PAD hingga mencapai Rp200 miliar. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan pemutakhiran data melalui pendataan kendaraan yang menunggak pajak untuk periode Juni sampai Desember 2024 guna menyempurnakan basis data kepemilikan kendaraan bermotor (samsatsleman.jogjaprov.go.id, 2024). Meski kondisi ekonomi dan mobilitas masyarakat menyiratkan pemulihan, persoalan ketaatan belum seluruhnya teratasi. Perbedaan mencolok antara data kendaraan milik BPS melalui data dari Samsat, serta meningkatnya akumulasi denda yang mencapai Rp10 miliar pada tahun 2024, menyiratkan adanya permasalahan administrasi serta rendahnya kesadaran pajak yang perlu diatasi melalui strategi kebijakan yang lebih optimal dan berbasis data yang valid.

II. TINJAUAN LITERATUR

Menurut Teori Perilku Terencna (Ajzen, 1991), perilaku individu termasuk dlm hal ketaatan pajak dibentuk oleh sikap, norma subyektif, dan persepsi atas kontrol perilaku. Dalam konteks PKB, empat aspek utama diketahui mempengarhui keputusan wp. Pertama, **sosialisasi pajak** diharapkan mampu meningkatkan pemahaman aturan pembayaran (Mellacantika & Bawono, 2023; Wibowo & Maryono, 2023; Siregar et al., 2025), walau hasil kajian bervariasi: impak positif (Aprilianti, 2021), negatif (Haninun & Lourent, 2022), atau bahkan tdk signifikan

(Arfiyanti & Akbar, 2024). Kedua, **kesadaran pajak** yg mencakup pemahaman serta kemauan patuh, disebut mendorong ketaatan (Cendana & Pradana, 2021; Prayitna et al., 2021; Awaloedin, 2023; Kantohe et al., 2023), namun bbrp studi lain menyiratkan impak yg lemah atau negatif (Atmoko, 2020; Yulyana, 2024). Ketiga, **kualitas pelayanan publik** seperti di Samsat DIY (dgn prinsip 5S & layanan inklusif) ikut mempengarhui sikap wp (Yustrianthe et al., 2024), meski hasilnya beragam—ada yg menyebut positif (Hidayat & Maulana, 2022; Pratista, 2023), negatif (Budianto, 2020), atau tidak signifikan (Listiana & Hernawati, 2024). Terakhir, **sanksi perpajakan** bertujuan memberi efek jera (Attamimi & Asalam, 2020), meski efektivitasnya diperdebatkan tergantung penegakan di lapangan (Sulistyowati et al., 2021; Widiowati & Elisabeth, 2023; Apsari et al., 2023). Keempat aspek tsb menjadi dasar analisa untuk mepoin faktor yg berperan mengenai ketaatan PKB di daerah.

III. TEKNIK KAJIAN

Kajian ini menerapkan pendekatan kuantitatif yang berlandaskan pada paradigma **positivism**, yang menganggap bahwa realitas bersifat objektif dan dapat dipercobaan secara empiris (Sugiyono, 2022). Tujuan kajian bersifat **deskreptif** melalui pendekatan deduktif, dan menggunakan desain **cross-sectional**, di mana proses pengumpulan data dilakukan sekali dalam satu waktu melalui teknik survei. Instrumen utama berupa **kuisioner** yang disebarkan kepada Wp kndraan bermtor yg tlh teregistrsi dlm basis data Samsat dijadikn obyek observasi secara resmi di Kantor Samsat Sleman. Fokus utama kajian ini adalah Studi ini dimaksudkan untuk mepoin pengaruh dari empat faktor bebas terhadap level keta'atan Wajib Pajak (Y), yang didefinisikan secara paralel melalui tindak-laku pemenuhan kewajiban fiskal secara cermat waktu dan sesuai rambu-rambu yuridis yang ditetapkan (Amri & Syahfitri, 2020). Adapun aspek bebas (independen) terdiri atas: (X1) **Sosialisasi Perpajakan**, yakni upaya penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat (Mellacantika & Bawono, 2023); (X2) **Kesadaran Pajak**, yaitu tingkat pemahaman dan kemauan sukarela dalam menjalankan kewajiban pajak (Cendana & Pradana, 2021); (X3) **Kualitas Pelayanan**, yang dievaluasi berdasarkan standar pelayanan publik dan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sesuai melalui panduan KemenPANRB (2017); dan (X4) **Sanksi Pajak**, yang mencerminkan instrumen penegakan hukum atas pelanggaran kewajiban perpajakan (Mulyati & Ismanto, 2021).

Proses kajian diawali melalui studi literatur guna merumuskan dasar teori dan menyusun hipotesis. Selanjutnya, kuisioner disebarkan secara daring melalui platform Google Form yang dilengkapi melalui pertanyaan filter untuk memastikan hanya responden yang memenuhi kriteria yang mengisi survei. Populasi kajian mencakup seluruh pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman, yang berdasarkan data tahun 2024 mencapai sebanyak **2.816.814 unit**. Dari jumlah tersebut, Sebnyk 100 individu dipilih sbg representatif menggunakan perumusan statistik tertentu dan margin of error sebesar 10% (Sugiyono, 2022). Penerapan teknik pengmbilan cuplikan menggunakan teknik non-probabilitas dgn pendekatan arbitrer sederhana, yang mana penentuannya bersifat tidak sistematis responden dilakukan secara arbitrer namun tidak Setiap entitas dalam populasi diberikan kans serupa untuk terseleksi menjadi bagian studi. Data yang dikumpulkan berasal dari **asal usul primer**, yaitu jawaban dari responden, serta **asal usul sekunder** berupa dokumen dan publikasi yang relevan. Instrumen pengukuran menggunakan **skala Likert** untuk mepoin persepsi Penyerapan jawaban dari respn terkait tiap-tiap parameter dilakukan dan kemudian dimaknakan melalui prosedur analitis secara kuantitatif melalui bantuan perangkat lunak **SPSS versi 27**, melalui percobaan statistik deskriptif dan penjabaran **regresi linier berganda** untuk mengpercobaan impak kausal antara aspek independen mengenai aspek dependen.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Pengumpulan data dijalankan secara primer melalui menyebarkan kuesioner pada 100 responden melalui link google form pada responden wp yang tinggal di Samsat Kab. Sleman. Karakteristik responden terbagi dalam jenis kelamin, baya, tingkat didikan, jenis karier, pendapatan per bulan, jenis kendaraan, lama kepemilikan seperti terlihat dalam Gambar 1 selanjutnya:

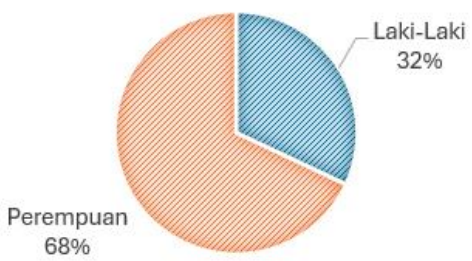

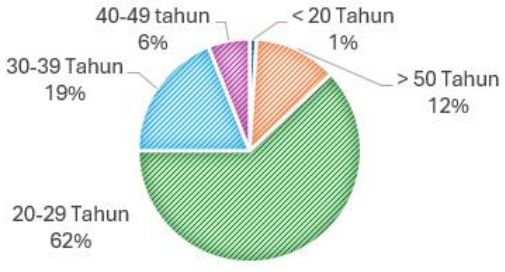

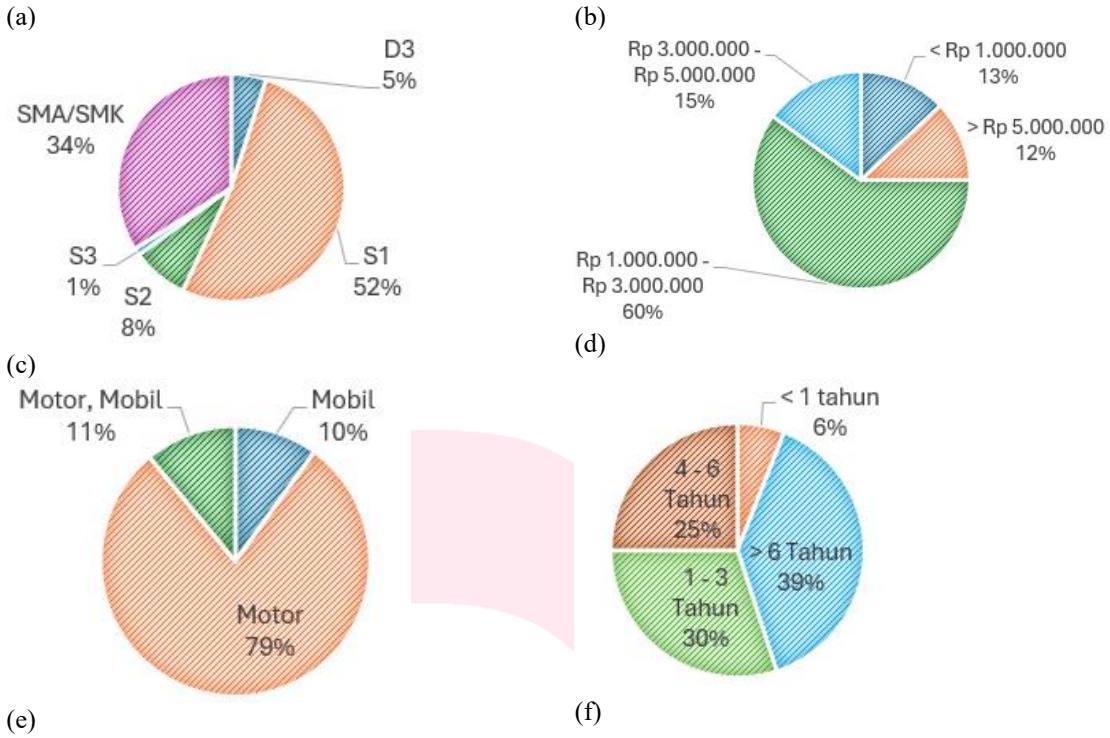

Gambar 1. Karakteristik responden: a) jenis kelamin, b) baya, c) tingkat didikan, d) pendapatan per bulan, e) jenis kendaraan, f) lama kepemilikan.

B. Hasil Percobaan Validitas

Berdasarkan jumlah partisipan sebanyak 100 responden, diperoleh poin r-Tabel pada tingkat sig. sebesar 5% yaitu sebesar 0,195. Pada Tabel 2 ditunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan yang termasuk dalam aspek bebas maupun aspek terikat memiliki poin r-hitung yang melampaui poin ambang r-tabel tersebut. Melalui demikian, dapat diinterpretasikan bahwa setiap item dalam instrumen pengukuran dinyatakan valid serta layak digunakan dalam tahapan penjabaran data selanjutnya.

C. Hasil Percobaan Reliabilitas

Merujuk pada pendapat Sugiyono (2022), suatu instrumen dapat digolongankan andal (reliable) apabila koefisien reliabilitas Cronbach's Alpha mencapai angka lebih dari 0,60. Makin tinggi poin alpha yang diperoleh, maka semakin tinggi pula derajat konsistensi internal antar butir dalam instrumen tersebut. Apabila poin alpha mendekati angka 1, hal ini merepresentasikan bahwa keseluruhan item dalam kuesioner memiliki stabilitas dan keajegan yang tinggi, serta dapat digunakan secara berkelanjutan dalam kegiatan kajian ilmiah.

D. Hasil Analisa Statistik Deskriptif

Tabel 4 menyajikan intisari hasil dari penjabaran statistik deskriptif mengenai aspek terikat serta keempat aspek bebas yang diteliti. Prosedur penjabaran ini bertujuan memberikan ikhtisar empiris mengenai pola distribusi data dan kecenderungan jawaban responden mengenai masing-masing indikator yang terkandung dalam aspek kajian. Informasi ini bermanfaat untuk memahami karakteristik umum tanggapan responden sebelum memasuki tahap penjabaran inferensial.

Tabel 4. Hasil Analisa Statistik Deskriptif

c	KWP (Y)	SPKM (X1)	KsWP (X2)	KP (X3)	SP (X4)
Indeks Maksimum	3000	2500	3000	3500	2500
Indeks Minimum	600	500	600	700	500
Jarak Interval	480	400	480	560	400
Persentase skor	83,03	75,88	79,77	75,83	79,12

Berdasarkan hasil pemetaan melalui penjabaran garis kontinum, diperoleh bahwa rerata persepsi responden mengenai aspek Ketaatan Wp (Y) mencapai 89,03%, yang berada dalam klasifikasi sangat baik, sesuai rentang golongan 84–100%. Hal ini menyiratkan bahwa secara umum, wp kendaraan bermotor di wilayah Samsat Sleman menyiratkan tingkat ketaatan yang tinggi dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Adapun pada aspek Sosialisasi Perpajakan (X1), diperoleh skor rerata sebesar 75,88%, sedangkan Kesadaran Wp (X2) mencatatkan poin rerata 79,77%; keduanya termasuk dalam golongan baik, meskipun masih terdapat sejumlah aspek yang patut dioptimalkan. Sementara itu, aspek Kualitas Layanan Publik (X3) menyiratkan angka rerata 75,83%, dan aspek Sanksi Pajak (X4) berada pada level 79,12%, yang juga terkualifikasi dalam golongan baik. Secara keseluruhan, temuan ini menyiratkan adanya tendensi positif mengenai persepsi masyarakat dalam aspek pelayanan dan regulasi perpajakan di Kabupaten Sleman. Kendati demikian, tetap terdapat celah-celah perbaikan pada indikator tertentu yang memerlukan perhatian dan penguatan lebih lanjut.

E. Hasil Percobaan Normalitas

Gambar 2 menyajikan hasil pengetesan normalitas yang dilakukan melalui teknik *Normal P–Plot of Regression Standardized Residuals,* yang berfungsi untuk mengevaluasi apakah data residual tersebar secara mendekati pola distribusi normal, serupa salah satu prasyarat dalam penjabaran regresi linier berganda

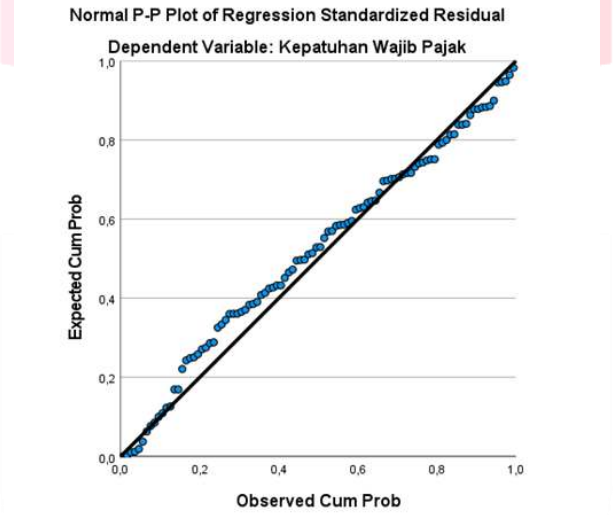

Gambar 2. Hasil percobaan normalitas.

F. Hasil Percobaan Multikolinearitas

Dalam kajian ini, pengetesan multikolinearitas dilakukan melalui memanfaatkan indikator utama, yakni poin Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi adanya interdependensi yang kuat antar aspek prediktor dalam model regresi. Apabila poin VIF melebihi ambang batas tertentu—umumnya di atas 10—maka hal tersebut dapat diinterpretasikan serupa indikasi adanya korelasi linear yang berlebihan antar aspek independen. Proses penjabaran dilaksanakan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS versi 27 (rilis 2025), dan hasil lengkapnya ditampilkan pada Tabel 5. Poin Tolerance yang terlalu kecil dan angka VIF yang membesar secara signifikan dapat mencerminkan adanya problematika multikolinearitas yang berpotensi memengaruhi kestabilan model. Namun demikian, berdasarkan hasil pengolahan data, tidak ditemukan indikasi kuat mengenai keberadaan gejala multikolinearitas yang bersifat disruptif mengenai struktur model regresi yang dibangun. Melalui demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek independen dalam studi ini dapat dikatakan bebas dari masalah redundansi korelasional yang mengganggu validitas penjabaran regresi.

Tabel 5. Hasil percobaan multikolinieritas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	12,647	1,964		6,438	<,001		
	Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor	-,130	,116	-,135	-1,122	,265	,447	2,236
	Kesadaran Wajib Pajak	,280	,112	,309	2,499	,014	,421	2,376
	Kualitas Pelayanan Pajak	,210	,083	,314	2,521	,013	,416	2,401
	Sanksi Pajak	,214	,117	,197	1,832	,070	,555	1,801

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

G. Hasil Percobaan Heteroskedastisitas

Deteksi mengenai kemungkinan gejala heteroskedastisitas dilakukan melalui penjabaran visual pada scatterplot yang memetakan koneksi antara poin prakiraan aspek terikat (ZPRED) dan residual yang telah didistandarkan (SRESID). Menurut Ghozali (2021), apabila distributor pada grafik tersebar secara arbitrer dan tidak membentuk pola sistematis tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari permasalahan heteroskedastisitas. Dalam kajian ini, pengetesan dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS versi 27 (2025), dan hasil visualisasinya ditampilkan pada Gambar 3. Berdasarkan hasil interpretasi grafik tersebut, tidak ditemukan indikasi pola penyebaran residual yang konsisten atau terstruktur. Hal ini menyiratkan bahwa varian galat bersifat konstan di seluruh poin prakiraan, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi homoskedastisitas, yang menjadi salah satu prasyarat validitas model dalam penjabaran regresi linier.

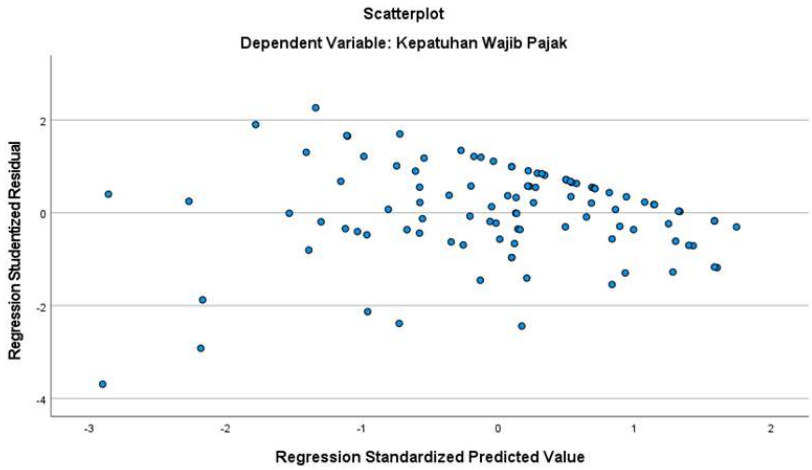

Gambar 3. Hasil percobaan heteroskedastisitas

H. Hasil Percobaan Analisa Regresi Linear Berganda

Dalam studi ini, digunakan teknik regresi linier berganda serupa pendekatan analitis untuk mengevaluasi arah serta intensitas impak dari masing-masing aspek bebas mengenai aspek terikat. Pengolahan data dilakukan melalui memanfaatkan perangkat lunak IBM SPSS versi 27 (rilis 2025) guna memastikan akurasi dan efisiensi dalam proses penjabaran statistik. Hasil dari estimasi model regresi tersebut dipaparkan pada Tabel 6, yang memuat informasi mengenai koneksi baik secara simultan (kolektif) maupun parsial (individual) antar aspek. Melalui tahapan ini, dapat diidentifikasi aspek mana yang memberikan dampak signifikan mengenai aspek terikat, sekaligus mengukur tingkat kontribusi relatif dari masing-masing prediktor dalam model. Interpretasi hasil regresi dilakukan melalui merujuk pada poin koefisien regresi, tingkat signifikansi statistik (p-value), serta arah relasi antar aspek, apakah bersifat positif atau negatif. Prosedur ini penting dalam membentuk pemahaman menyeluruh mengenai struktur koneksi kausal dalam model yang telah dibangun, sekaligus menjadi dasar bagi rekomendasi kebijakan atau tindak lanjut kajian selanjutnya..

Tabel 6. Hasil percobaan penjabaran regresi linear berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Correlations		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Zero-order	Partial	Part
1	(Constant)	12,647	1,964		6,438	<,001			
	Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor	-,130	,116	-,135	-1,122	,265	,397	-,114	-,090
	Kesadaran Wajib Pajak	,280	,112	,309	2,499	,014	,559	,248	,201
	Kualitas Pelayanan Pajak	,210	,083	,314	2,521	,013	,551	,250	,202
	Sanksi Pajak	,214	,117	,197	1,832	,070	,485	,185	,147

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

I. Hasil Percobaan Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) merupakan pengukuran yang dilakukan guna mengetahui besarnya kemampuan model dalam menerangkan aspek dependen. Hasil percobaan koefisien determinasi diperlihatkan pada Tabel 7 selanjutnya:

Tabel 7. Hasil percobaan koefisien determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,623[a]	,388	,362	3,08447

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

J. Hasil Percobaan Hipotesis Simultan (Percobaan F)

Pengetesan secara simultan dilakukan melalui Percobaan F, yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah seluruh aspek bebas secara kolektif memiliki impak yang signifikan mengenai aspek terikat. Percobaan dilaksanakan melalui menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, di mana model dinyatakan layak (fit) apabila poin F-hitung lebih besar daripada F-tabel (Ghozali, 2021). Interpretasi dari hasil tersebut menyiratkan bahwa model regresi yang dibentuk dapat digunakan secara valid untuk keperluan prakiraan dan inferensi mengenai fenomena yang diteliti. Hasil pengetesan disajikan pada Tabel 8, yang dipenjabaran menggunakan perangkat lunak IBM SPSS versi 27 (2025). Berdasarkan keluaran (output) yang diperoleh, diketahui bahwa model regresi yang digunakan dalam kajian ini memenuhi kriteria kelayakan statistik, sehingga dapat dianggap relevan dan absah untuk mengidentifikasi serta mengestimasi impak aspek-aspek independen mengenai aspek dependen secara keseluruhan.

Tabel 8. Hasil percobaan hipotesi simultan

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	572,762	4	143,191	15,051	<,001[b]
	Residual	903,828	95	9,514		
	Total	1476,590	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak

K. Hasil Percobaan Hipotesis Parsial (Percobaan t)

Pengetesan parsial dilakukan melalui penjabaran percobaan t guna mengevaluasi impak masing-masing aspek bebas mengenai tingkat ketaatan wp kendaraan bermotor. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS versi 27 (2025). Hasil pengetesan menyiratkan bahwa aspek Kesadaran Wp menyiratkan impak yang signifikan melalui poin signifikansi sebesar 0,014 (< 0,05), demikian pula melalui aspek Kualitas Pelayanan, yang memperoleh poin signifikansi 0,013 (< 0,05). Melalui demikian, kedua aspek tersebut terbukti memiliki dampak positif dan bermakna secara statistik mengenai ketaatan. Sebaliknya, aspek Sosialisasi Pajak memiliki poin signifikansi 0,267 dan Sanksi Pajak sebesar 0,070, yang keduanya melebihi ambang batas 0,05, sehingga tidak memberikan kontribusi signifikan dalam memengaruhi perilaku ketaatan. Temuan ini menyiratkan bahwa walaupun kebijakan sosialisasi dan penerapan sanksi telah dijalankan, keduanya belum mampu memberikan dorongan kuat dalam meningkatkan ketaatan pajak di konteks yang diteliti.

Berdasarkan hasil percobaan hipotesis parsial, aspek Sosialisasi PKB memperoleh poin koefisien regresi -0,130 melalui tingkat signifikansi 0,265 (> 0,05), sehingga hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Artinya, sosialisasi tidak memiliki impak yang signifikan mengenai tingkat ketaatan. Dalam sistem official assessment yang dianut Indonesia, besaran kewajiban pajak sudah ditentukan oleh otoritas fiskal dan tercantum dalam SKPD-PKB, sehingga wp tidak perlu melakukan perhitungan mandiri. Informasi mengenai nominal, tenggat waktu, serta prosedur pembayaran juga telah tersedia melalui berbagai kanal resmi, termasuk aplikasi e-Samsat. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, skor rerata aspek ini sebesar 75,88%, yang berada dalam golongan baik, menyiratkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memiliki kontrol perilaku yang memadai. Maka, meskipun sosialisasi dilaksanakan, dampaknya menjadi terbatas karena wp merasa telah memahami kewajiban perpajakan secara cukup tanpa memerlukan penjelasan tambahan (Mellacantika & Bawono, 2023).
Percobaan t menghasilkan bahwa aspek Kesadaran Wp memiliki poin koefisien regresi sebesar 0,280 dan signifikansi 0,014 (< 0,05), yang berarti hipotesis nol ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Ini menegaskan bahwa kesadaran berimpak signifikan dan positif mengenai ketaatan pembayaran PKB. Wp yang memiliki tingkat kesadaran tinggi cenderung memandang pajak serupa bentuk kontribusi moral dan sosial mengenai kemajuan bangsa. Sikap ini memperkuat intensi perilaku patuh, sehingga mereka cenderung melaksanakan kewajiban pajak secara teratur dan tepat waktu. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, skor rerata aspek ini mencapai 79,77%, digolongankan baik, yang menyiratkan bahwa sebagian besar responden telah memiliki kesadaran yang memadai dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya (Cendana & Pradana, 2021).

Hasil pengetesan parsial menyiratkan bahwa aspek Kualitas Pelayanan memiliki koefisien regresi sebesar 0,210 dan signifikansi 0,013 (< 0,05). Artinya, terdapat impak yang signifikan dan positif mengenai tingkat ketaatan wp. Temuan ini sejalan melalui Theory of Planned Behavior (TPB), khususnya dalam dimensi perceived behavioral control, di mana kemudahan dalam pelayanan memperkuat keyakinan wp untuk memenuhi kewajibannya. Unsur seperti kesopanan, profesionalisme, dan keadilan dalam pelayanan turut berperan dalam menciptakan pengalaman interaksi yang positif di kantor Samsat. Statistik deskriptif menyiratkan bahwa aspek ini memperoleh skor rerata sebesar 75,83%, yang termasuk golongan baik. Hal ini menyiratkan bahwa aspek kemudahan prosedur, fasilitas yang nyaman, serta etika petugas berkontribusi secara signifikan mengenai ketaatan. Namun, tetap diperlukan peningkatan transparansi informasi dan perbaikan dalam mekanisme pengaduan agar kepercayaan masyarakat dapat terus ditingkatkan (Yustrianthe, Wiranto, & Purwantini, 2024)

Berdasarkan hasil percobaan t, aspek Sanksi Perpajakan menyiratkan koefisien regresi sebesar 0,214 melalui signifikansi 0,070 (> 0,05). Melalui demikian, aspek ini tidak berimpak signifikan mengenai ketaatan. Walaupun secara keseluruhan tingkat ketaatan berada pada angka 89,03%, masih terdapat sekitar 10,97% wp yang belum taat. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebabnya adalah adanya program penghapusan denda dan pemutihan yang diberlakukan oleh Samsat Sleman selama tahun 2024, yang memunculkan persepsi bahwa keterlambatan pembayaran tidak menimbulkan konsekuensi berarti. Statistik deskriptif untuk aspek ini menyiratkan skor rerata sebesar 79,12%, tergolong dalam golongan baik, tetapi tidak signifikan secara statistik. Dalam kerangka TPB, persepsi mengenai kurangnya ketegasan sanksi berdampak pada lemahnya perceived control dan norma subjektif, sehingga impak kontrol sosial menjadi berkurang. Akibatnya, sebagian wp cenderung meniru pola ketidakpatuhan yang berkembang di lingkungan sosialnya (Sulistyowati, Ferdian, & Girsang, 2021).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penjabaran statistik deskriptif, tingkat Ketaatan Wp Kendaraan Bermotor berada pada golongan sangat baik, sementara seluruh aspek independen tergolong dalam klasifikasi baik. Secara inferensial, hanya X2 dan X3 yang terbukti memberikan dampak signifikan dan positif mengenai ketaatan, sedangkan aspek Sosialisasi dan Sanksi tidak menyiratkan impak yang bermakna. Temuan ini menyiratkan bahwa peningkatan kesadaran melalui didikan dan pengalaman positif dalam pelayanan publik merupakan strategi utama yang perlu

diprioritaskan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB. Meski demikian, perlu dicermati bahwa data yang digunakan dalam kajian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner daring yang belum sepenuhnya mewakili populasi wp aktif sesuai siklus pembayaran. Oleh karena itu, disarankan agar SAMSAT Sleman mulai mengintegrasikan pengumpulan data secara langsung saat transaksi pembayaran berlangsung, agar diperoleh data yang lebih real-time dan representatif. Untuk kajian selanjutnya, disarankan agar objek kajian diperluas mencakup jenis pajak daerah lainnya, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai impak kesadaran fiskal mengenai peningkatan PAD secara komprehensif.

REFERENSI

Ajzen, I. (1994). *The Theory of Planned Behavior*. In I. Kuhl, & J. Beckmann, *Action Control: From Cognition to Behavior* (pp. 11-39). Springer.

Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Impak Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak mengenai Ketaatan Wp dalam Membayar PKB di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 108-118.

Aprilianti, A. A. (2021). Impak Kesadaran Wp, Sosialisasi Perpajakan, Insentif Pajak, Sistem E-Samsat mengenai Ketaatan Wp Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi COVID-19. *ASSETS Journal*, 1-20.

Apriliyani, L. H. (2022). Impak Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan mengenai Ketaatan Wp Kendaraan Bermotor. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 65-74.

Apsari, R. T., Haryanti, S. S., & Nawangsasi, E. (2023). Impak Bea Balik Nama, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan mengenai Ketaatan Wp Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karanganyar. *Excellent: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 1-10.

Arfiyanti, D. H., & Akbar, F. S. (2024). Impak Program Pemutihan, Kesadaran Wp, dan Sosialisasi Perpajakan mengenai Ketaatan Wp Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wp di Kantor Samsat Surabaya Timur). *Jurnal Ilmiah MEA* (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi).

Atmoko, E. D. (2020). Impak Kesadaran Wp mengenai Ketaatan Wp Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditting*, 140-150.

Attamimi, A. R., & Asalam, A. G. (2020). Impak Kualitas Pelayanan Pajak, Pengetahuan Wp, dan Sanksi Perpajakan mengenai Ketaatan Wp dalam Membayar PKB (Studi pada Samsat Wilayah Takalar Sulawesi Selatan Tahun 2020). *E-Proceeding of Management*, 8(5), 5186-5193.

Awaloedin, D. T. (2023). Kesadaran Wp dan Faktor-Faktor yang Memimpakinya. *Jurnal Perpajakan dan Kewajiban Wp*, 123-135.

Budianto, Y. R. (2020). Impak Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Love of Money mengenai Ketaatan Membayar PKB. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 217-233.

Cellynia, D., & Marlinah, A. (2022). Faktor-Faktor yang Memimpaki Ketaatan Wp dalam Membayar PKB di Jakarta Barat. *Media Ilmiah Akuntansi*, 57-64.

Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021). Penjabaran Impak Kesadaran Wp dan Pengetahuan Wp mengenai Ketaatan dalam Membayar Pajak Kendaraan Motor (PKB) di Wilayah DKI Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 22-23.

Darmawan, A. F. (2023). Impak Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Razia Lapangan, Sarana E-Samsat, dan Layanan Samsat Keliling Mengenai Ketaatan Wp Kendaraan Pada Samsat di Kota Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Penjabaran Multivariate melalui Program IBM SPSS 26* (Edisi 10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Haninun, D., & Lourent, A. (2022). Impak Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wp, Sanksi Perpajakan mengenai Ketaatan Wp Kendaraan Bermotor. *SINOMIKA JOURNAL*, 1-12.

Hidayat, I., & Maulana, L. (2022). Impak Kesadaran Wp, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak mengenai Ketaatan Wp Kendaraan Bermotor di Kota Tangerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting* (BJRA).

Kantohe, M. S., Lonto, M., & Pakasi, Y. G. (2023). Kesadaran Wp, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Ketaatan Wp Kendaraan Bermotor. *JRAK*, 87-100.

Kementerian Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2017). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 mengenai Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat bagi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Jakarta, Indonesia.

Listiana, A. M., & Hernawati, R. I. (2024). Impak Karakteristik Wp, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Inovasi

Sistem Drive Thru mengenai Ketaatan Wp Kendaraan Bermotor Di Kota Pati. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 5(1), 33-44.

Mellacantika, E., & Bawono, A. D. (2023). The Effect of Tax Knowledge, Tax Socialization, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, And Tax Services on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes (Case Study on Motor Vehicle Taxpayers in Ngawi Regency). *Journal of Taxation Analysis and Review*, 3 no 2.

Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Impak Penerapan E-Feling, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak mengenai Ketaatan Wp pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 139-155.

Pratista, F. L. (2023). Impak Kesadaran Wp, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Wp, Kondisi Keuangan Wp Mengenai Ketaatan Wp (Studi Kasus pada Wp Kendaraan Bermotor di DIY).

Prayitna, Saraswati, & Witono, B. (2021). Impak Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wp, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Akuntanbilitas Pelayanan Publik mengenai Ketaatan Wp dalam Membayar PKB (Studi Pada Wp Samsat Kota Surakarta). *IKRAITH-EKONOMIKA*, 134-141.

samsatsleman.jogjaprov.go.id. (2024, 12 12). *Benarkah Opsen Membuat Pajak Kendaraan Naik?* Retrieved from Samsat Sleman: https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/index.php/248-benarkah-opsen-membuat-pajak-kendaraan-naik

samsatsleman.jogjaprov.go.id. (2024, 12 8*). Program Bebas Denda Pajak 09 Desember-20 Desember 2024*. Retrieved from Samsat Sleman: https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/index.php/247-program-bebas-denda-pajak-09-desember-20-desember-2024

samsatsleman.jogjaprov.go.id. (2024, 6 14). *Program Pendataan Potensi PKB 2024*. Retrieved from Samsat Sleman: https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/index.php/199-program-pendataan-potensi-pajak-kendaraan-bermotor-2024

Siregar, L., Sarwani, & Yuliani, R. (2025). Penjabaran Impak Penerapan Sistem E-Filing Mengenai Ketaatan Wp melalui Sosialisasi Perpajakan serupa Aspek Moderasi pada Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat. *Perpajakan*, 2(1), 1-14.

Sugiyono. (2022). *Teknik Kajian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Impak Kesadaran Wp, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Didikan Mengenai Ketaatan Wp. *Jurnal Ilmiah Akuntansi & Bisnis*.

Wibowo, G., & Maryono. (2023). Penjabaran Impak Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Mengenai Ketaatan Wp UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Akutansi dan Pajak*, 24(1).

Widiowati, L. Y., & Elisabeth, D. R. (2023). Impak Kesadaran Wp, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Mengenai Ketaatan Wp Dalam Membayar PKB. *Jurnal Kompetensi Social Science*, 1.

Yulyana. (2024). Impak Kesadaran Wp, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat mengenai Ketaatan PKB melalui Kualitas Pelayanan serupa Aspek Moderasi. *Jurnal Inovasi Akuntansi*.

Yustrianthe, R. H., Wiranto, D. H., & Purwantini, M. (2024). Determinan Faktor Ketaatan Wp Kendaraan Bermotor : Suatu Studi Empiris Di Sleman Yogyakarta. *Measurement : Jurnal Akuntansi*, 13-32